

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

DISKUSI KELOMPOK PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENYELENGGARAAN URUSAN KONKUREN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BIDANG KOMUNIKASI PUBLIK

Oleh:

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

A. LATAR BELAKANG

Proses perencanaan kebijakan merupakan proses awal dari sebuah pelaksanaan kegiatan. Demikian pula dalam pelaksanaan urusan konkuren bidang komunikasi. Sampai dengan saat ini beberapa, Provinsi Jawa Tengah belum banyak mencetuskan rumusan kebijakan berupa peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah terkait penyelenggaraan komunikasi publik. Sedangkan beberapa regulasi daerah yang telah ada, memiliki consideran yang sudah tidak layak karena banyak yang dicabut, dan bahkan masih perlu diupdate terkait adanya disrupsi era teknologi komunikasi.

Salah satu rumusan kebijakan tersebut yaitu, Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan, Pengembangan, dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Provinsi Jawa Tengah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini. Sebab, aturan yang mendasari Pergub tersebut sudah banyak yang dicabut, baik dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 8/PER/M.KOMINFO/6/2010, dan 22/PER/M.KOMINFO/12/2010, maupun dasar Pergub Jawa Tengah sebelumnya yaitu Pergub Jateng Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tupoksi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Di sisi lain pergub eksisting diterbitkan sebelumnya adanya UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang baru. Berdasarkan kewenangan urusan daerah maka saat ini telah dibentuk Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai lini tugas pemerintah daerah dalam urusan komunikasi berdasarkan Pergub Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2016 tentang Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

Berangkat dari hal-hal tersebut di atas, maka diperlukan penyusunan rancangan Pergub (Rapergub) Jateng baru yang mengatur

tentang penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bidang komunikasi public. Pergub ini diharapkan menampung omni directional bidang komunikasi public yang sesuai dengan kondisi saat ini. Antara lain dalam hal kewenangan, komunikasi public, informasi public, pengelolaan konten, penanganan misleading informasi, kebijakan media, perangkat komunikasi, kehumasan dan sebagainya.

Oleh sebab itu, beberapa Langkah ditempuh guna menginisiasi penyusunan Draft Pergub Jateng tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren bidang komunikasi public. Selain rapat awal yang telah dilakukan berkali-kali, konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Kominfo RI serta komparasi dengan daerah lain, maka diperlukan diskusi-diskusi terpusat untuk mewadahi masukan, saran, kritik, sekaligus menyempurnakan draft Rapergub yang sedang disusun. Dengan adanya pergub baru nanti diharapkan menjadi pedoman penyelenggaraan urusan bidang komunikasi public di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informasi.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Koordinasi antara stakeholder pelaksana dan akademisi dalam memberikan kajian atau telaah terkait draft Rapergub,
2. Mengakomodir saran dan masukan dari peserta diskusi dalam penyusunan Rapergub Jateng terkait penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bidang komunikasi publik;
3. Menyusun Draft Rapergub Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,

C. METODE

Metode penyusunan draft Rapergub Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diawali dengan rapat-rapat persiapan, pembagian tugas antar bidang, konsultasi dan koordinasi serta komparasi dengan Kementerian Kominfo Ri dan daerah lain, serta penyelenggaraan Diskusi Kelompok.

Diskusi kelompok diikuti oleh pemangku kepentingan. Dalam hal ini perwakilan bidang-bidang dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan masukan terkait draft pada bagian dari Rapergub sesuai dengan tugas fungsinya, Biro Hukum Setda Prov. Jateng, serta kalangan akademisi. Kalangan akademisi dibutuhkan untuk

memberikan kajian atau telaah akademis terkait kebijakan public, isi rapergub mengenai pengelolaan komunikasi maupun sisi akademis lain. Diskusi bersifat dua arah dengan partisipasi aktif seluruh peserta serta bukan berupa diskusi panel.

Hasil draft pergub selalu dikoordinasikan dengan Biro Hukum Setda Prov. Jateng. Draft final akan disampaikan ke Biro Hukum Setda Prov. Jateng untuk dibahas lebih lanjut dan melalui proses persetujuan kepala daerah.

D. PELAKSANAAN

Setelah beberapa kali rapat inisiasi dan pembagian tugas, dilakukan diskusi kelompok I. Diskusi I melaksanakan Pembahasan Rancangan Pergub tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Komunikasi Publik pada:

Hari	: Senin – Selasa
Tanggal	: 13 – 14 Desember 2021
Tempat	: Hotel Horison Ultima Yogyakarta
Pembahasan	: Penyusunan Rapergub tentang Penyelenggaraan Urusan Konkuren Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Bidang Komunikasi Publik

E. Narasumber

1. Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah
2. Dekan Fisipol Universitas Tidar Magelang
3. Akademisi bidang komunikasi MMTTC Jogjakarta

F. ANGGARAN/BIAYA

Penyelenggaraan kegiatan Diskusi Rapergub Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada DPPA nomor 00608/DPPA/2021 di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Untuk akomodasi peserta dari masing-masing bidang ditanggung oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik sebanyak 1 (satu) personil. Keberangkatan menggunakan transportasi yang disediakan di titik kumpul

(lihat rundown). Sedangkan untuk para narasumber disediakan 1 (satu) kamar akomodasi oleh panitia.

G. KEPANITIAAN

1. Penanggung jawab : Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik
Agung Kristiyanto, S.Sos
2. Ketua Pelaksana : Kepala Seksi Sumberdaya Kehumasan
Dra. Dyah Widiastuti
3. Sekretaris : Dr. Galih Wibowo. S.Sos, MA
4. Bendahara : Amin Indramanto, S.Sos
5. Anggota : 1. Dian Meylina S. Sos
2. M. Sidqi
3. Soejoedi

H. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Diskusi Rapergub Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan.

KEPALA BIDANG INFORMASI
DAN KOMUNIKASI PUBLIK

AGUNG KRISTIYANTO, S.Sos

Pembina
NIP. 19670216 199703 1 003

RUNDOWN ACARA

Judul Acara : Rapergub Penyelenggaraan Urusan Konkuren Bidang Komunikasi pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Waktu : Senin – Selasa, 13 – 14 Desember 2021

Lokasi : Hotel Horison Ultima
Jl. Gowongan Kidul 33-49 Kota Jogjakarta

NO	WAKTU	KEGIATAN	KETERANGAN
Senin, 13 Desember 2021			
1	09.00 – 13.00	Tim IKP/panitia berangkat menuju Dinas Kominfo Prov. DIY	
2	13.00 – 16.00	Tim Panitia Kunjungan koordinasi di Dinas Kominfo Prov. DIY	Studi komparatif pengelolaan media tradisional, KIM, dsb.
3	13.00 – 17.00	Perjalanan peserta diskusi menuju lokasi diskusi	Titik kumpul di Dinas Kominfo Prov. Jateng,
4	17.00 – 18.00	Registrasi peserta	Hotel Horison Ultima Jogjakarta
5	18.00 – 19.00	Makan malam	
6	19.00 – 21.00	Pembukaan dan Diskusi awal (disediakan coffer break)	Diawali dari Kabid IKP, Narasumber hadir diperkenalkan, Bidang-bidang memberikan penjelasan terkait kontribusi pasal.
7	21.00 – 07.00	Istirahat	
Selasa, 14 Desember 2021			
8	07.00 – 08.30	Sarapan pagi	
9	08.30 – 10.00	Diskusi Lanjutan	Moderator memimpin acara, Bidang-bidang memberikan penjelasan terkait kontribusi pasal. Narasumber memberikan masukan Tanya jawab diskusi
10	10.00 – 10.15	Coffee break	
11	10.15 – 11.00	Closing Diskusi	Moderator Kembali memimpin acara Narasumber memberikan closing statement. Pembacaan simpulan sementara draft Rapergub

